

BAB II

LANDASAN TEORI

Sudah jelas bahwa pembangunan nasional menentukan GNP (*Gross National Product*) yang tinggi dan pertumbuhan yang cepat. Namun masalah dasarnya bukan hanya bagaimana mendistribusikan GNP, tetapi juga siapakah yang akan menumbuhkan GNP, sebagian besar masyarakat yang ada di dalam sebuah negara atautkah hanya segelintir orang yang ada di dalamnya. Jika yang menumbuhkan hanyalah orang - orang kaya yang berjumlah sedikit, maka manfaat pertumbuhan GNP itu pun hanya akan dinikmati oleh mereka saja, sehingga ketimpangan pendapatan pun akan semakin parah. Namun apabila pertumbuhan dihasilkan oleh banyak orang, maka mereka pulalah yang akan memperoleh manfaat terbesarnya dan hasil pertumbuhan ekonomi akan terbagi secara lebih adil dan merata (Todaro dan Smith, 2004:219).

Pada umumnya di negara – negara sedang berkembang masalah pendapatan yang rendah dan kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian dalam tujuan pembangunan ekonomi kedua hal tersebut selalu dinyatakan bersamaan sehingga menjadi satu kalimat yaitu peningkatan pendapatan nasional dan pengurangan kemiskinan (Suhardjo, 1997).

Dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional maka persoalan pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan merupakan dimensi yang perlu mendapatkan perhatian. Hal ini terutama untuk melihat tingkat pendapatan dan pembagian pendapatan diantara warga masyarakatnya yaitu siapa yang

mendapatkan dan siapa yang beruntung. Aspek ini semakin menarik, terutama dikaitkan dengan masih besarnya rakyat miskin di Indonesia terutama di wilayah pedesaan. Berbicara perihal kemiskinan maka secara langsung (eksplisit) maupun tidak langsung (Implisit) telah membicarakan tentang ketimpangan distribusi pendapatan penduduk.

2.1. Mengukur Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara dikalangan penduduknya. Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan, terutama di negara - negara sedang berkembang (Dumairy, 1997:53).

2.1.1. Distribusi Antar Kelompok

Distribusi pendapatan perseorangan (*personal distribution of income*) atau distribusi antar kelompok pendapatan (*size distribution of income*) merupakan indikator yang paling sering digunakan. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Yang perlu diperhatikan disini adalah seberapa banyak jumlah pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, baik itu dari bunga simpanan maupun tabungan, laba usaha, utang, hadiah ataupun warisan. Lokasi sumber penghasilan (desa atau kota) maupun sektor atau bidang kegiatan yang menjadi sumber penghasilan juga diabaikan (Todaro,2000: 180).

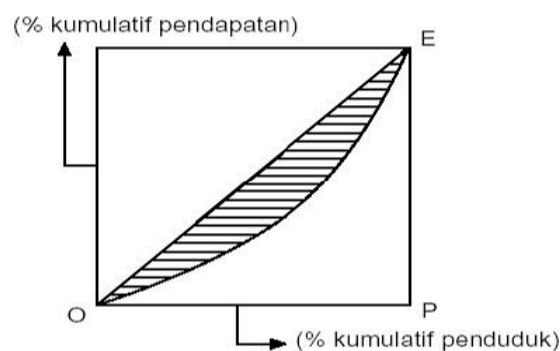
Oleh karena itu, para ekonom dan ahli statistik cenderung mengurutkan semua individu berdasarkan pendapatan yang diterimanya, kemudian membagi

total populasi menjadi sejumlah kelompok atau ukuran, biasanya populasi dibagi menjadi 5 kelompok atau kuantil (*quantile*) atau 10 kelompok yang disebut desil (*decile*) sesuai dengan tingkat pendapatan mereka. Langkah selanjutnya adalah menetapkan beberapa proporsi yang ditentukan oleh masing - masing kelompok dari pendapatan nasional total (Todaro dan Smith, 2004:222).

2.1.2. Kurva Lorenz

Metode lain yang biasanya dipakai untuk menganalisis statistik pendapatan perorangan adalah dengan menggunakan Kurva Lorenz (*Lorenz Curve*). Jumlah penerimaan pendapatan dinyatakan pada sumbu horizontal, tidak dalam arti absolut melainkan dalam persentase kumulatif. Garis diagonal dalam Kurva Lorenz malambangkan pemerataan sempurna (*perfect equality*) dalam distribusi antar kelompok pendapatan masing-masing persentase kelompok penerima pendapatan menerima persentase pendapatan total yang sama besarnya, contohnya 40% kelompok terbawah menerima 40% dari pendapatan total, sedangkan 5% kelompok teratas hanya menerima 5% dari pendapatan total (Todaro dan Smith, 2004:223).

Gambar. 2.1. Kurva Lorenz

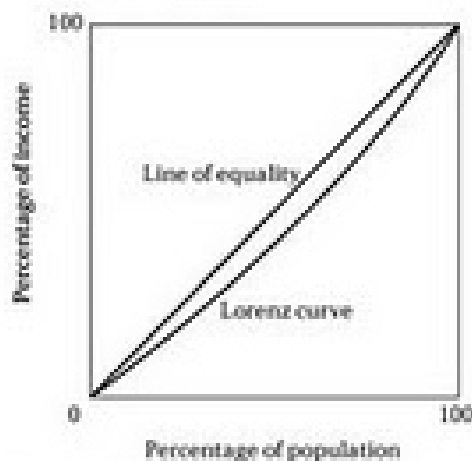


Sumber : www.knowledgerush.com/wiki_image

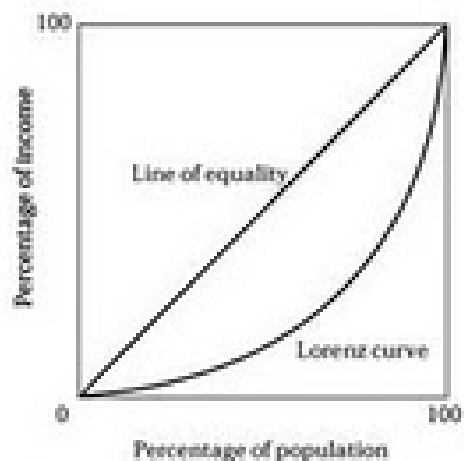
Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total yang benar - benar mereka terima, misalnya dalam satu tahun. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal (garis pemerataan sempurna) maka semakin timpang atau tidak meratanya distribusi pendapatan. Semakin tinggi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan disuatu negara maka bentuk kurva lorenznya pun akan semakin melengkung mendekati sumbu horizontal bagian bawah. Dua macam bentuk kurva Lorenz yang melambangkan kondisi distribusi pendapatan yang jauh berbeda dapat dilihat pada gambar 2.2. Gambar. 2.2.a. menunjukan suatu distribusi pendapatan yang relatif merata (ketimpangan tidak parah), sedangkan gambar. 2.2.b. menunjukan suatu distribusi pendapatan yang relatif tidak merata (ketimpangan parah)

Gambar. 2.2.

Gambar. 2.2.a.



Gambar. 2.2.b.

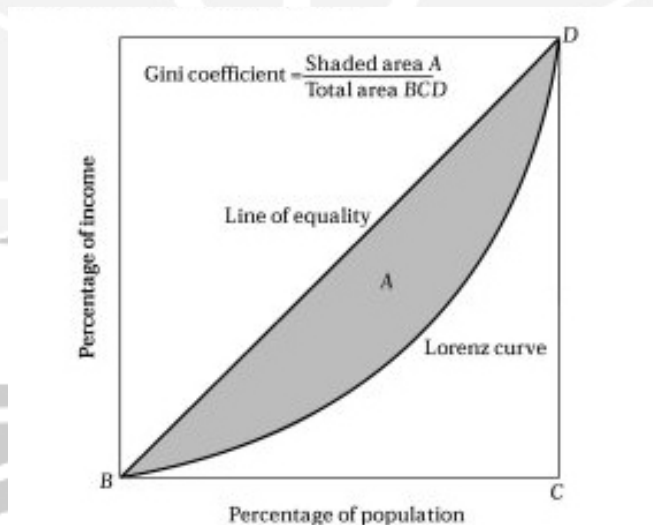


Sumber :Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith

2.1.3. Koefisien Gini

Alat ukur atau media yang sangat mudah digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan relatif disuatu negara adalah dengan menghitung rasio yang terletak diantara garis diagonal dari Kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh segi empat dimana kurva Lorenz itu berada. Dalam gambar. 2.3., rasio ini adalah rasio daerah A yang diarsir dibagi dengan luas segitiga BCD. Rasio ini dikenal dengan Koefisien Gini (*Gini Coefficient*) yang diambil dari nama ahli statistik Italia yang bernama C. Gini yang merumuskan pertama kali pada tahun 1912 (Todaro dan Smith, 2004:226)

Gambar. 2.3. Koefisien Gini



Sumber : www.knowledgerush.com/wiki_image

Koefisien gini juga dapat dihitung dengan menggunakan matematik. Rumus koefisien gini sebagai berikut (Arsyad, 1999:232).

$$KG = 1 - \sum_{i=1}^n (X_{1+i} - X_1) (Y_i + Y_{i+1})$$

Atau

$$KG = 1 - \sum_{i=1}^n f_i(Y_{i-1} + Y_i)$$

Dimana:

KG = Angka koefisien gini

X_i = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i

F_i = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i

Y_i = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i

Kelas i = Jika dibagi menjadi lima kelas: 20% miskin, 20% kedua, 20% ketiga, 20% keempat dan 20% terkaya. Jika dibagi menjadi tiga kelas: 40% miskin, 40% menengah, 20% kaya.

Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna), hingga satu (ketimpangan sempurna). Pada prakteknya Koefisien Gini untuk negara - negara yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50 hingga 0,70, ketimpangan sedang berkisar antara 0,36 hingga 0,49 sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata angkanya berkisar antara 0,20 hingga 0,35 (Todaro dan Smith, 2004:226).

2.1.4. Distribusi Fungsional (*Functional Distribution*)

Ukuran distribusi pendapatan fungsional berfokus pada bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing - masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja dan modal). Teori distribusi fungsional ini pada dasarnya mempersoalkan persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan bukan

sebagai unit - unit usaha atau faktor produksi yang terpisah secara individual dan membandingkannya dengan persentase pendapatan total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga dan laba. Walaupun individu - individu tertentu mungkin saja menerima seluruh hasil dari segenap sumber daya tersebut, tetapi hal itu bukanlah fokus perhatian dari analisis pendekatan fungsional itu (Todaro dan Smith, 2004:228).

2.2. Distribusi Pendapatan di Pedesaan

Ketimpangan pendapatan di pedesaan banyak dipengaruhi oleh kondisi agroekosistem daerah setempat. Apabila wilayah berproduktivitas rendah mempunyai hubungan timbal balik dengan kemiskinan, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Oleh karena itu suatu wilayah yang tingkat produktivitasnya rendah maka dapat mengakibatkan kemiskinan pada masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, ketidakmampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya yang ada mengakibatkan wilayah tersebut menjadi miskin.

Struktur pendapatan rumah tangga di pedesaan sangat bervariasi tergantung pada keragaman sumberdaya yang ada di wilayah tersebut. Keragaman sumberdaya mempengaruhi struktur pendapatan rumah tangga di pedesaan. Sumber pendapatan di suatu wilayah berkaitan langsung dengan keragaman sumberdaya yang ada di wilayah tersebut. Secara umum agroekosistem di wilayah pedesaan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu lahan basah (sawah) dan lahan kering.

Secara teoritis, perubahan pola distribusi pendapatan pada masyarakat di pedesaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut (Tambunan, 2001:83):

- 1) Akibat dari arus penduduk/pekerja dari pedesaan ke perkotaan yang selama masa periode orde baru berlangsung sangat pesat sesuai dengan teori A. Lewis (1954) perpindahan penduduk dari pedesaan yang notabene sangat padat penduduknya ke perkotaan yang notabene kepadatan penduduknya jauh lebih rendah memberikan suatu dampak yang positif terhadap perekonomian di pedesaan.
- 2) Struktur pasar dan besarnya distorsi yang berbeda antara di pedesaan dengan di perkotaan. Di pedesaan jumlah sektor unit usaha (dilihat dari jumlah unit usaha di dalam suatu sektor) masing - masing sektor usaha relatif lebih rendah dibandingkan dengan di perkotaan. Struktur pasar yang relatif sederhana di pedesaan membuat distorsi pasar juga relatif lebih kecil (kesempatan berusaha bagi individu lebih besar) dibandingkan dengan di perkotaan.
- 3) Dampak positif dari proses pembangunan ekonomi nasional tersebut bisa dilihat dalam beragam bentuk diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Semakin banyak kegiatan - kegiatan ekonomi di pedesaan diluar sektor pertanian, seperti: industri manufaktur (kebanyakan dalam skala kecil atau industri rumah tangga), perdagangan, perbengkelan, pertukangan, dan sektor jasa lainnya. Diversifikasi ekonomi di pedesaan ini tentu menambah jumlah kesempatan kerja di pedesaan dan juga menambah pendapatan masyarakat di pedesaan.

- b) Tingkat produktifitas dan pendapatan (dalam nilai riil) tenaga kerja disektor pertanian meningkat bukan saja akibat arus penduduk/pekerja dari sektor tersebut, melainkan dari sektor - sektor lainnya di perkotaan (seperti dalam teori A. Luwis) tetapi juga bisa diakibatkan penerapan atau pemakaian teknologi baru dan penggunaan input - input yang lebih baik misalnya, pupuk hasil pabrik, permintaan pasar domestik dan ekspor terhadap komoditi-komoditi pertanian meningkat.
- c) Potensi sumberdaya alam (SDA) yang ada di daerah pedesaan semakin baik di dimanfaatkan oleh penduduk setempat (pemakaian semakin optimal)

2.2.1. Kepemilikan dan Distribusi Tanah

Tanah merupakan faktor produksi yang utama bagi produksi pertanian dan sangat besar peranannya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat petani. Berawal dari tanahlah proses produksi dalam usaha pertanian dimulai, dan dari tanah pula kesejahteraan masyarakat petani berawal karena keterkaitan yang erat antara tanah dengan kesejahteraan masyarakat petani, maka persoalan tanah menunjukan suatu permasalahan yang sangat krusial dalam produksi pertanian pada umumnya dan kehidupan petani pada khususnya.

Sistem kepemilikan tanah sangat berperan dalam pola distribusi pendapatan. Kedua variabel tersebut saling mempengaruhi atau berkaitan satu sama lain, distribusi tanah pertanian sangat mempengaruhi hasil akhir distribusi pendapatan. Proses pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan distribusi pendapatan yang semakin membaik akan terjadi apabila pada tahap awal pembangunan distribusi tanah lebih merata.

Pola penguasaan dan kepemilikan tanah tak dapat dipisahkan dari permasalahan kemiskinan masyarakat petani di pedesaan. Kekurangan tanah merupakan indikator utama masalah kemiskinan pada masyarakat petani di pedesaan. Di wilayah pedesaan, tampak ironis sekali bahwa petani yang tidak mempunyai tanah kehidupannya sangat tergantung pada petani pemilik tanah yang luas (tuan tanah). Petani golongan ekonomi rendah (miskin dan tidak mempunyai tanah) yang lebih banyak jumlahnya, hanya akan menjadi penggarap tanah milik golongan ekonomi tinggi (petani pemilik tanah dengan tingkat kepemilikan yang luas) yang lebih sedikit jumlahnya.

2.3. Definisi Pendapatan

Pendapatan rumah tangga khususnya di pedesaan umumnya berasal dari berbagai sumber, yang berbeda antar rumah tangga. Hal ini tergantung pada kesempatan bekerja dan berusaha dari masing - masing angkatan kerja. Kesempatan tersebut erat kaitannya dengan penguasaan keterampilan, penguasaan aset - aset produktif dan aksesibilitas terhadap permodalan. Kurangnya penguasaan terhadap salah satu unsur tersebut menjadikan angkatan kerja yang bersangkutan bekerja dengan hanya mengandalkan tenaga fisik yang tentunya hanya terbatas pada jenis – jenis pekerjaan dengan produktivitas tenaga kerja yang rendah. Konsekuensinya akan menerima pendapatan yang rendah pula.

2.3.1. Konsep Pendapatan (*Income*)

Pendapatan adalah total penerimaan (uang atau bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu. Ada tiga sumber penerimaan rumah tangga, yaitu:

1) Pendapatan dari gaji dan upah

Gaji dan upah adalah balas jasa atas kesediaan seseorang menghasilkan barang/ jasa.

2) Pendapatan dari aset produktif

Aset Produktif adalah aset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya. Ada dua aset produktif. Pertama, aset finansial, seperti tabungan/deposito yang menghasilkan pendapatan bunga, saham yang menghasilkan deviden dan keuntungan atas modal bila diperjualbelikan. Kedua, aset bukan finansial, seperti rumah/tanah yang memberikan sewa.

3) Pendapatan dari pemerintah (*transfer payment*)

Pendapatan dari pemerintah adalah pendapatan yang diterima bukan karena balas jasa atau input yang diberikan. Misalnya dalam bentuk tunjangan sosial bagi para pengangguran, jaminan sosial bagi orang - orang miskin dan berpendapatan rendah.

2.4. Aspek dan Karakteristik Kemiskinan

Pembahasan masalah kemiskinan ini dapat di dekati dari 3 (tiga) aspek, yaitu: penyebab, ukuran, dan indikator kemiskinan (Arsyad, 1992: 180-199). Ketiga aspek tersebut akan dibahas berikut ini:

2.4.1. Penyebab Kemiskinan

Tidak sulit mencari faktor - faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor - faktor tersebut sangat sulit memastikan mana yang merupakan penyebab sebenarnya atau utama serta mana yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan (Tambunan, 1995).

Sebagai suatu contoh, sering dikatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah. Seseorang hanya dengan tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) akan sangat sulit mendapatkan pekerjaan, terutama disektor modern (formal) dengan pendapatan yang baik. Akan tetapi, pertanyaanya adalah apakah tingkat pendidikan yang rendah itu adalah penyebab utama/sebenarnya. Apabila banyak orang di Indonesia hanya berpendidikan sekolah dasar (SD) karena orang tua mereka tidak sanggup membiayai pendidikan lanjutan, maka jelas penyebab sebenarnya adalah masalah biaya atau lebih tepatnya lagi disebabkan oleh kemiskinan (orang tua mereka) kalau diteruskan kebelakang, pertanyaan selanjutnya adalah: kenapa orang tua mereka miskin dan kenapa juga pendidikanya rendah. Jadi terdapat semacam lingkaran setan (*vicious circle*) dalam masalah timbulnya kemiskinan.

Kalau diuraikan satu per satu, jumlah faktor - faktor yang dapat mempengaruhi langsung maupun tidak langsung tingkat kemiskinan cukup banyak, mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan *output* (produktivitas tenaga kerja), tingkat upah, distribusi pendapatan, kesempatan kerja (termasuk jenis pekerjaan yang tersedia), tingkat inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta kualitas sumberdaya alam, ketersediaan fasilitas umum (seperti pendidikan dasar, kesehatan, informasi, transportasi, listrik, air dan lokasi pemukiman), penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam disuatu wilayah, etos kerja dan motivasi kerja, kultur budaya/tradisi, politik, bencana alam dan peperangan.

Dilihat dari sektoral, pusat kemiskinan di Indonesia terdapat disektor pertanian. Kemungkinan ada tiga faktor penyebab utama mengapa sektor pertanian merupakan pusat kemiskinan di Indonesia, yaitu (Tambunan, 2001; 160): Pertama, tingkat produktivitas yang rendah, disebabkan karena jumlah pekerja disektor tersebut terlalu banyak, sedangkan tanah, kapital, teknologi terbatas dan tingkat pendidikan petani yang rata - rata sangat rendah. Kedua, daya saing petani atau daya tukar domestik (*trem of treade*) antara komoditi pertanian terhadap hasil output industri semakin lemah. Perbedaan harga ini disebabkan antara lain oleh perbedaan nilai tambah antara hasil pertanian dan hasil industri serta tata niaga yang lebih menguntungkan produsen disektor industri. Ketiga, tingkat diverifikasi usaha di sektor pertanian ke jenis - jenis komoditi *non food* yang memiliki prospek pasar (terutama *ekspor*) dan harga yang lebih baik masih sangat terbatas.

2.4.2.1.Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan memang tidak mudah untuk mengukurnya. Ada dua (2) macam ukuran kemiskinan yang umum digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

2.4.2.2.Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan harga dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk

memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut, konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik, makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup (Arsyad, 2004: 238).

2.4.2.3. Kemiskinan Relatif

Secara sederhana kemiskinan relatif dapat dilihat dengan membandingkan proporsi atau persentase penduduk yang berada pada dan dibawah garis kemiskinan absolut dengan jumlah penduduk keseluruhan. Untuk lebih memperoleh gambaran sesungguhnya tentang tingkat kemiskinan relatif atau pemerataan kesejahteraan ekonomi perlu diketahui distribusi pendapatan.

2.4.3. Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan ada bermacam - macam, yaitu: konsumsi beras per kapita pertahun, tingkat pendapatan, dan tingkat kesejahteraan.

2.4.3.1. Tingkat Konsumsi Beras

Untuk kepentingan pengentasan kemiskinan dan penentuan masyarakat yang miskin di bentuk pula konsep pengukuran kemiskinan. Sajogyo (1978) mengukur garis kemiskinan dengan menggunakan ukuran nyata, yakni setara nilai tukar beras, dan tidak menggunakan ukuran moneter. Alasannya karena beras merupakan pengeluaran konsumsi terbesar bagi penduduk Indonesia yang tergolong miskin untuk daerah pedesaan, penduduk dengan konsumsi beras

kurang dari 320 Kg per kapita pertahun digolongkan miskin sedangkan untuk daerah perkotaan adalah 480 Kg per kapita pertahun.

Tabel. 2.1.
Indikator Kemiskinan Menurut Tingkat Konsumsi Beras di Pedesaan dan Perkotaan di Indonesia.

Jenis Kemiskinan	Pedesaan	Perkotaan
Melarat	180 Kg	270 Kg
Sangat Miskin	240 Kg	360 Kg
Miskin	320 Kg	480 Kg

Sumber : Lincolin Arsyad, 1992

Kritik terhadap metode Sajogyo adalah bahwa beras bukanlah merupakan bahan makanan pokok bagi penduduk pedesaan yang miskin.

2.4.3.2. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan per kapita rumah tangga adalah pendapatan total anggota rumah tangga yang bekerja dalam setahun dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Menurut BPS, pada tahun 2006 garis kemiskinan penduduk perkotaan ditetapkan sebesar Rp.175.324,- per kapita perbulan dan penduduk miskin pedesaan sebesar Rp.131.256,- per kapita perbulan. Dengan uang senilai tersebut seseorang diasumsikan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi, ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lain seperti perumahan, sandang, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian ukuran atau tingkat kemiskinan akan diukur dengan melihat besarnya pendapatan dan konsumsi pengeluaran rumah tangga per kapita. Tingkat pengeluaran per kapita perbulan diukur dengan besaran rupiah dan selanjutnya dengan menggunakan kriteria BPS ditetapkan tingkat/garis kemiskinan yang setiap tahun besarnya disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi dan harga barang - barang.

2.4.3.3. Indikator Kesejahteraan Rakyat

Selain data pendapatan dan pengeluaran, ada beberapa komponen tingkat kesejahteraan rakyat yang sering di gunakan. Pada publikasi *united nations* (1961) yang berjudul *international definition and meansurement of levels af living: an interm guide*, di sarankan ada 9 komponen kesejahteraan rakyat yaitu: kesehatan, konsumsi makan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan.

2.4.3.4. Kriteria Bank Dunia (*World Bank*)

Selain Kurva Lorenz dan Koefisien Gini, cara pengukuran lainnya yang juga umum digunakan terutama oleh Bank Dunia (*World Bank*), adalah dengan cara jumlah penduduk dikelompokan menjadi 3 kelompok, yaitu penduduk dengan pendapatan rendah yang merupakan 40% dan penduduk dengan berpendapatan menengah yang merupakan 40% dan jumlah penduduk berpendapatan tinggi yang merupakan 20% dari jumlah penduduk. Selanjutnya ketidak merataan pendapatan pada suatu perekonomian diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk yang berpendapatan rendah.

Menurut Bank Dunia (*Word Bank*), tingkat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dinyatakan tinggi apabila 40% penduduk dari kelompok berpendapatan rendah menerima lebih kecil dari 12% dari jumlah pendapatan, tingkat ketidakmerataan sedang apabila kelompok tersebut menerima 12% - 17% dari jumlah pendapatan dan tingkat ketidakmerataan rendah apabila kelompok tersebut menerima lebih dari 17% dari jumlah pendapatan.

2.4.3.5. Indeks Pembangunan Manusia

Sejak tahun 1990 *United Nations for Development Program* (UNDP) mengembangkan suatu indeks yang sekarang dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks =HDI*). Indikator - indikator yang digunakan untuk menyusun indeks ini adalah: (1) tingkat harapan hidup, (2) tingkat melek huruf masyarakat, dan (3) tingkat pendapatan riil per kapita berdasarkan daya beli masing - masing negara (Arsyad, 2004; 37).

Komponen - komponen Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat berdasarkan batas maksimum dan minimum pada tabel. 2.2. dibawah ini.

Tabel 2.2
Nilai Maksimum dan Minimum dari setiap Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
2. Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
3. Rata-Rata Lama Sekolah	15	0	
4. Daya Beli	732.720 ^{a)} \$40.000 ^{c)}	300.000 (1996) 360.000 ^{b)} (1999,2002) \$100 ^{c)}	UNDP menggunakan PDB Riil disesuaikan

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia 2006-2007; BPS

Keterangan: a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018

b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru

c) Standar UNDP

Berdasarkan Tabel. 2.2. dengan melihat komponen indeks angka harapan hidup, angka melek huruf, rata - rata lama sekolah dan daya beli (PDB riil disesuaikan), kita dapat menurunkan rumus perhitungan *Human Development Indeks* (HDI) dengan menghitung terlebih dahulu indeks (komponen - komponen HDI) sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X_{(i)} = [X_{(i)} - X_{(i) \min}] / [X_{(i) \max} - X_{(i) \min}]$$

Di mana:

$X_{(i)}$: Indikator ke-i ($i=1,2,3$); $X_{(i) \max}$: nilai maksimum $X_{(i)}$, $X_{(i) \min}$: nilai minimum $X_{(i)}$. Berdasarkan prosedur di atas, maka HDI dapat dihitung dengan persamaan berikut ini :

$$\text{HDI} = 1/3 [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$$

Di mana: $X_{(1)}$ = Indeks harapan hidup kelahiran

$X_{(2)}$ = Indeks pendidikan = $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (indeks rata - rata lama sekolah)

$X_{(3)}$ = Indeks standar hidup layak.

Pengukuran HDI telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali dicetuskan. Mungkin yang terpenting adalah bahwa indeks tersebut telah disederhanakan sehingga sekarang HDI dihitung secara lebih langsung. Khususnya dimasa lampau rumus yang relatif lebih rumit digunakan untuk mengkonversi *Purchasing Power Parity* (PPP) menjadi pendapatan yang disesuaikan (yang berarti bahwa pendapatan disesuaikan demi memenuhi asumsi utilitas marjinal yang semakin menurun). Sekarang, kita memperoleh pendapatan yang disesuaikan hanya dengan menghitung log natural dari pendapatan saat ini.

Kemudian untuk menemukan indeks pendapatan kurangi log natural 100 dari log natural pendapatan saat ini karena diyakini bahwa pendapatan per kapita paling rendah yang mungkin terdapat disemua negara selama generasi yang lalu adalah PPP \$100. Perbedaannya mencerminkan seberapa jauh negara yang bersangkutan telah melampaui pos tujuan terendah ini. Untuk mendapatkan

perspektif dari kemajuan ini, pikirkan dalam hubungannya dengan jumlah maksimum pendapatan yang dapat dicapai sebuah negara untuk generasi berikut. UNDP mematok angka \$40.000. Jadi kemudian kita membagi perbedaan antara log \$40.000 dengan log \$100 untuk mengetahui kemajuan pendapatan relatif yang berhasil dicapai oleh sebuah negara (Todaro dan Smith, 2006; 73). Sehingga komponen-komponen perhitungan HDI dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Pendapatan} = \frac{[\text{Log (GDP Per Capita)} - \text{Log (100)}]}{[\text{Log (4000)} - \text{Log (100)}]}$$

$$\text{Indeks Harapan Hidup} = \frac{[\text{Usia Harapan Hidup} - 25]}{[85 - 25]}$$

$$\begin{aligned} \text{Indeks Pendidikan} = & \frac{2}{3} (\text{Indeks kemampuan baca tulis orang dewasa}) \\ & + \frac{1}{3} (\text{Indeks masa bersekolah bruto}) \end{aligned}$$

Dimana indeks kemampuan baca tulis orang dewasa dan indeks masa bersekolah bruto dapat dihitung sebagai berikut:

Indeks kemampuan baca tulis orang dewasa

$$= \frac{[\% \text{Kemampuan membaca orang dewasa} - 0]}{[100 - 0]}$$

Indeks masa bersekolah bruto

$$= \frac{[\% \text{Penduduk usia sekolah yang bersekolah} - 0]}{[100 - 0]}$$

Dengan menggunakan ketiga ukuran pembangunan dan menerapkan rumus tersebut untuk menghitung data dari 177 negara, HDI memeringkat semua negara menjadi tiga kelompok: tingkat pembangunan manusia yang rendah (0,0 hingga 0,499), tingkat pembangunan manusia menengah (0,50 hingga 0,799), dan tingkat pembangunan manusia yang tinggi (0,80 hingga 1,0) (Todaro dan Smith, 2006; 73)